

**AKIBAT HUKUM PUTUSAN PERKARA
NOMOR:191/PDT.G/2011/PN.MLG DENGAN OBYEK GUGATAN
HARTA BERSAMA
(ANALISIS YURIDIS TENTANG KOMPETENSI ABSOLUT)**

ARTIKEL HUKUM

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat Memperoleh
Gelar Kesarjanaan Dalam Ilmu Hukum

Oleh :

DIMAS SINGGIH DWI APRILLIA

NIM. 0910110028



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
MALANG
2013**

ABSTRAKSI

Dimas Singgih Dwi Aprillia, Hukum Perdata, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Maret 2013, AKIBAT HUKUM PUTUSAN PERKARA NOMOR:191/PDT.G/2011/PN.MLG DENGAN OBYEK GUGATAN HARTA BERSAMA (ANALISIS YURIDIS TENTANG KOMPETENSI ABSOLUT), Ulfa Azizah, S.H. M.Kn; Rachmi Sulistyarini, S.H. M.H.

Pada skripsi ini penulis mengangkat permasalahan tentang akibat hukum putusan perkara nomor:191/Pdt.G/2011/Pn.Mlg dengan obyek gugatan harta bersama terkait tentang kompetensi absolut. Pilihan tema tersebut dilatar belakangi oleh adanya tindakan penggugat atau (N) yang menggugat mantan istri atau (S) dengan mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Malang pada bulan November 2011 tentang perkara harta bersama dengan dasar gugatan Perbuatan Melawan Hukum.

Berdasarkan hal tersebut, skripsi ini mengangkat rumusan masalah: Bagaimana akibat hukum putusan perkara nomor:191/Pdt.G/2011/Pn.Mlg dengan obyek gugatan harta bersama terkait tentang kompetensi absolut? Kemudian penulisan skripsi ini menggunakan jenis penelitian Yuridis Normatif, dengan metode pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*).

Dari hasil penelitian dengan metode di atas, penulis memperoleh jawaban atas permasalahan yang ada. Bahwa akibat hukum putusan perkara nomor: 191/Pdt.G/2011/Pn.Mlg dengan obyek gugatan harta bersama terkait tentang kompetensi absolut dilihat dari dua sudut pandang, yaitu Akibat Hukum putusan perkara nomor: 191/Pdt.G/2011/Pn.Mlg dari sudut pandang norma bahwa terhadap hal telah terjadi ketidaksesuaian antara pokok permasalahan dengan dasar gugatan karena sebenarnya pokok permasalahan yang terjadi antara Penggugat dengan mantan istri atau Tergugat I adalah mengenai hal Harta Bersama/Gono Gini sedangkan Penggugat dalam gugatannya menggunakan dasar gugatan untuk menggugat mantan istri tersebut dengan dasar Perbuatan Melawan Hukum, dan penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Malang maka akibat segi normanya adalah menjadi absolut kompetensi, seharusnya gugatan diajukan ke Pengadilan Agama sesuai pasal 49 UU Peradilan Agama. Dan akibat hukum putusan perkara nomor: 191/Pdt.G/2011/Pn.Mlg dari sudut pandang putusan pengadilan adalah Putusan Pengadilan Negeri Malang tersebut menjadi putusan pasti atau tetap dan putusan itu mempunyai kekuatan yang mengikat terhadap kedua belah pihak. Pada putusan yang telah diputuskan Pengadilan Negeri Malang tersebut harus dihormati oleh kedua belah pihak dan salah satu pihak tidak boleh bertindak bertentangan dengan putusan. Di dalam bahasa latin dikatakan "*Res judicata pro veritate habetur*" artinya putusan yang pasti dengan sendirinya mempunyai kekuatan yang mengikat (apa yang diputuskan oleh hakim, adalah dianggap benar).

Kata Kunci : Akibat Hukum, Harta Bersama, Kompetensi Absolut

ABSTRACT

Dimas Singgih Dwi Aprillia, Civil Law, Faculty of Law, University of Brawijaya, March 2013, DUE TO LEGAL DECISION CASE NUMBER: 191/PDT.G/2011/PN.MLG TOGETHER WITH THE OBJECT OF PROPERTY LITIGATION (juridical ANALYSIS OF COMPETENCE ABSOLUT), Ulfa Azizah, SH M.Kn; Rachmi Sulistyarini, S.H. M.H.

In this thesis, the author raised concerns about the legal effect of the decision of the case number: 191/Pdt.G/2011/Pn.Mlg with objects related lawsuit joint property of absolute competence. The choice of theme background by the act of the plaintiff or (N) is suing ex-wife or (S) by filing a lawsuit to Malang District Court in November 2011 on the case along with the basic property lawsuit Unlawful Deeds.

Based on this, this paper raised the formulation of the problem: How can the legal effect of the decision of the case number: 191/Pdt.G/2011/Pn.Mlg with the object of matrimonial property claims related absolute competence? This thesis then use this type of normative juridical research, the method of approach to legislation (statute approach) and approach the case (case approach).

From the results of research by the above method, the authors obtained answers to existing problems. That the legal effect of the decision of the case number: 191/Pdt.G/2011/Pn.Mlg with objects related lawsuit joint property of absolute competence seen from two points of view, which is a result of the decision of the Law case number: 191/Pdt.G/2011/Pn. Mlg from the standpoint of the norm that the thing has happened discrepancy between issues on the basis of a lawsuit because the actual issues involved between the Plaintiff or the Defendant's ex-wife is the thing I treasure Together / Gono Gini plaintiff in the lawsuit while using basic lawsuit to sue ex-wife The basis of Deeds Against the Law, and the plaintiffs filed a lawsuit in the District Court of Malang then result in terms of the norm is to be absolute competence, should a lawsuit filed with the Court pursuant to article 49 of Law Religion Religious Courts. And the legal effect of the decision of the case number: 191/Pdt.G/2011/Pn.Mlg from the point of view of the decision of the court is the Malang District Court Decision a definite decision or ruling it fixed and have binding force on both sides. In the verdict had been decided the Malang District Court must be respected by both parties and one party may not act contrary to the verdict. In the Latin saying "Res judicata pro veritate habetur" means a definite decision by itself has binding force (what is decided by the judge, is considered to be true).

Keywords: Due to Legal, Shared Treasures, Absolute Competence

A. PENDAHULUAN

Manusia merupakan makhluk sosial, tidak dapat hidup sendiri tanpa interaksi maupun bantuan orang lain. Interaksi manusia dengan manusia lainnya secara khusus bisa disebut dengan hubungan cinta kasih. Supaya cinta kasih itu tidak rusak, manusia sebagai makhluk yang berkeTuhanan wajib menghalalkan hubungan itu dengan melakukan pernikahan atau perkawinan.

Dalam perkawinan pasangan suami istri mengikat dirinya pada suatu persetujuan yang disepakati, tujuannya adalah saling setia mentaati peraturan dan ketentuan-ketentuan di dalam masyarakat secara timbal balik, terhadap anak-anaknya, sanak keluarganya dan terhadap orang lain di dalam kehidupan bermasyarakat.

Demi terciptanya sinergitas, keseimbangan, dan keharmonisan dalam kehidupan berkeluarga, pemerintah mengambil peran sebagai pembentuk undang-undang, merumuskan hukum perkawinan, yaitu hukum yang mengatur hubungan suami istri dalam kehidupan keluarga, akibat-akibat yang ditimbulkan dari perkawinan serta hal-hal lain, yang semua itu diwujudkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dengan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, sebagai Peraturan Pelaksananya. Aturan ini bersifat nasional untuk seluruh warga negara Indonesia.

Dalam ketentuan pasal 1 undang-undang nomor 1 tahun 1974¹ disebutkan tentang pengertian perkawinan yaitu : "Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa." Aturan ini kemudian menjadi aturan pokok dari aturan hukum perkawinan, maupun dalam peraturan lainnya yang mengatur tentang perkawinan.

Ditinjau dari sudut pandang agama Islam, pernikahan merupakan peristiwa suci, dimana dua orang berlainan jenis bisa hidup bersama dan direstui oleh

¹ R. Subekti. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, PT.Pradnya Paramita, Jakarta, 2004, hlm.537

agama, kerabat serta masyarakat. Firman Allah swt dalam QS:An-Nuur ayat 32: *“Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu dan orang-orang yang layak(berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan hamba sahayamu yang perempuan. Jika ia miskin Allah akan memampukan mereka dengan karunianya. Dan Allah Maha Luas(pemberiannya) Lagi Maha Mengetahui”*.

Setiap orang umumnya mendambakan kehidupan keluarga yang bahagia dan kekal sepanjang masa. Namun pada kenyataannya dalam menjalani kehidupan dengan ikatan perkawinan pasti selalu ada permasalahan-permasalahan yang muncul. Hal tersebut dapat memicu bentuk-bentuk kesenjangan/permasalahan sehingga timbul keinginan dari suami atau istri untuk melakukan perceraian sebagai penyelesaian permasalahan.

Perceraian sebagaimana diatur dalam Undang-undang nomor 1 tahun 1974 dimasukkan sebagai salah satu alasan putusnya perkawinan selain karena kematian dan putusan pengadilan. Menurut pasal 38 undang-undang nomor 1 tahun 1974², disebutkan bahwa: “Perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian dan atas putusan pengadilan.” Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan, dan yang bersangkutan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.³ Dalam arti lain perceraian ini dikehendaki oleh kedua belah pihak, sehingga apabila salah satu pihak atau laki-laki tidak menghendaki perceraian maka perceraian itu tidak akan terjadi.⁴

Dalam hal melakukan perceraian harus cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan hidup rukun sebagai suami istri.⁵ Keadaan ini dapat disebabkan karena salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain.⁶

²R. Subekti, *Ibid*, hlm.549

³ H Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia*.,Mandar Maju, Bandung, 1990, Hlm.162.

⁴ Putusan Perkara Nomor.191/Pdt.G/2011/PN.Malang, hlm 16

⁵ Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 39 ayat (2)

⁶ Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksana Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, Pasal 19

Adanya perceraian tersebut akan membawa akibat hukum karena terputusnya ikatan suami istri. Apabila dalam perkawinan itu sudah mempunyai anak, maka perceraian juga membawa akibat hukum terhadap si anak. Dan dilain hal, akibat perceraian termasuk juga di dalamnya adalah mengenai harta bersama (gono-gini).

Dalam pasal 37 undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, juga menyatakan, *bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing*. Dalam penjelasan pasal 37 menyatakan bahwa: yang dimaksud “hukumnya” masing-masing ialah hukum agama, hukum adat dan hukum-hukum lainnya.

Dalam perkara nomor:191/Pdt.G/2011/PN.Mlg bermula adanya suatu perkawinan antara (N) dengan (S) secara Islam. Selama perkawinan antara (N) dengan (S) mempunyai harta bersama. Pada akhirnya perkawinan (N) dengan (S) putus karena cerai talak, sehingga atas harta bersama selama perkawinan itu dilakukan pembagian dalam suatu akta pembagian harta bersama nomor 38 pada tanggal 14 Januari 2003. Atas dasar pembagian harta bersama itu, mantan istri atau (S) melakukan perjanjian sewa menyewa lahan dengan pihak pengusaha. Namun karena merasa dirinya dirugikan, mantan suami (N) menggugat (S) ke Pengadilan Negeri Malang, telah pula menggugat pengusaha yang menjadi rekan kerja (S).

Pengadilan Negeri Malang sebagai badan peradilan yang menangani perkara-perkara perdata di wilayah Kota Malang telah menerima, memeriksa dan memutus perkara dengan Putusan Nomor: 191/Pdt.G/2011/PN.Mlg. Pertimbangan Hakim, karena pokok sengketa adalah mengenai harta gono-gini dan yang bersangkutan adalah bergama Islam maka sesuai dengan pasal 37 undang-undang nomor 1 tahun 1974, kewenangan untuk mengadili sengketa tersebut adalah Pengadilan Agama, oleh karena itu Pengadilan Negeri cq Pengadilan Negeri Malang tidak berwenang untuk itu.⁷

⁷Putusan, *Ibid*, Hlm 45

Berdasarkan alasan/dalil yang dibuktikan dalam persidangan, maka dalam pertimbangan hukum hakim memutus mengabulkan eksepsi para Tergugat tentang kewenangan mengadili dan menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Malang tidak berwenang mengadili gugatan Penggugat dalam perkara No.191/Pdt.G/2011/PN.Mlg, serta menghukum Penggugat (N) untuk membayar biaya perkara⁸.

Dari putusan tersebut, penulis beranalisis bahwa aturan hukum yang dipakai oleh Majelis hakim dalam pertimbangan hukum pada putusan sudah sesuai dengan yang seharusnya dilakukan. Putusan ini baik dan benar. Namun, selanjutnya bukan tidak ada permasalahan hukum yang dapat diteliti mengenai putusan ini. Penulis beranalisis, bahwa akibat hukumnya lah yang harus diteliti dari putusan ini. Bagaimana Akibat hukum dari segi norma hukum dan akibat hukum dari segi putusan pengadilan mengenai perkara dengan obyek sengketa harta bersama atas putusannya perkawinan karena perceraian yang terkait dengan kompetensi absolut/kewenangan mutlak pengadilan, putusan perkara nomor:191/Pdt.G/2011/Pn.Mlg. Menganalisis akibat hukum, maka dapat diketahui kedudukan hukum yang menjadi subyek dan obyek sengketa pada putusan perkara nomor:191/Pdt.G/2011/Pn.Mlg.

Harapannya dengan penelitian mengenai permasalahan yang penulis teliti, dapat memberikan tambahan ilmu pengetahuan bagi pembaca dan khususnya bagi penulis.

B. MASALAH

Berdasarkan uraian dalam latar belakang diatas, penulis merumuskan permasalahan hukum yang akan dikaji yaitu mengenai, bagaimana analisis akibat hukum putusan perkara Nomor:191/Pdt.G/2011/Pn.Mlg dengan obyek gugatan harta bersama terkait tentang kompetensi absolut?

C. METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian yuridis normatif yaitu bertujuan untuk menganalisis akibat hukum putusan perkara

⁸ Putusan, *Ibid*, Hlm 46

NOMOR:191/PDT.G/2011/PN.MLG dengan obyek gugatan harta bersama terkait tentang kompetensi absolut.

Dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan metode pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan terhadap berbagai aturan atau produk hukum yang berkaitan dengan harta bersama/gono gini, kewenangan pengadilan agama, yaitu : Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 jo Undang-undang nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, dan pendekatan kasus dilakukan pada putusan perkara nomor:191/Pdt.G/2011/Pn.Mlg supaya didapatkan suatu hasil analisis yang tepat dan berdasar hukum.

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

Adapun dalam teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan cara studi kepustakaan dengan menghimpun bahan hukum dari literatur dan peraturan perundang-undangan. Bahan hukum yang diperoleh, dikumpulkan dan dipelajari serta dikutip dari berbagai sumber seperti literatur, peraturan perundang-undangan, artikel, jurnal, makalah, atau yang berkaitan dengan judul dan permasalahan yang penulis teliti, selanjutnya akan diinterpretasikan dan dianalisis berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku dan berkaitan dengan judul serta permasalahan yang penulis teliti.

Pengumpulan bahan hukum menggunakan teknik studi kepustakaan dengan mengumpulkan dan menelusur bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang berkaitan dengan permasalahan yang penulis teliti.

Adapun dalam teknik analisis bahan hukum dilakukan dengan cara teknik analisis isi atau *content analysis*, yaitu teknik untuk menganalisis bahan hukum tulisan atau dokumen dengan cara mengidentifikasi secara sistematis ciri atau karakter dan pesan atau maksud yang terkandung dalam tulisan atau dokumen.

Dalam penelitian penulis menggunakan bahan hukum primer adalah berupa yurisprudensi atau putusan Pengadilan Negeri Malang nomor:191/Pdt.G/2011/Pn.Mlg dengan obyek gugatan harta bersama, yang

kemudian dengan menggunakan metode tersebut di atas, bahan hukum dikaji lebih lanjut sesuai dengan permasalahan yang penulis angkat supaya diperoleh suatu jawaban yang jelas dari rumusan permasalahan yang telah penulis rumuskan di awal.

D. PEMBAHASAN

Dalam Bab IV yaitu Bab Hasil dan Pembahasan, penulis akan memaparkan atau mendeskripsikan hasil penelitian dari permasalahan yang penulis teliti yakni mengenai akibat hukum putusan perkara nomor: 191/Pdt.G/Pn.Mlg dengan obyek gugatan harta bersama terkait tentang kompetensi absolute.

Sebelum membahas mengenai akibat hukum putusan perkara, terlebih dahulu akan penulis deskripsikan mengenai posisi kasus pada putusan perkara yang menjadi bahan analisis penulis. Dari deskripsi posisi kasus tersebut, maka sebagai Akibat Hukum Putusan Perkara Nomor:191/Pdt.G/2011/Pn.Mlg Dengan Obyek Gugatan Harta Bersama Terkait Tentang Kompetensi Absolut, dianalisis dari dua sudut pandang yaitu; dari sudut pandang norma dan dari sudut pandang putusan pengadilan.

1. Deskripsi Posisi Kasus

a) Subyek

Dalam perkara nomor: 191/Pdt.G/2011/Pn.Mlg, terdapat beberapa subyek hukum yang ikut dalam berperkara. Subyek hukum adalah suatu pihak yang berdasarkan hukum telah mempunyai hak/kewajiban/kekuasaan tertentu atas sesuatu tertentu. Pada dasarnya subjek hukum dapat dibedakan atas: Orang dan Badan hukum.

Subyek hukum dalam kasus ini yaitu :

1. (N), umur 68 tahun, pekerjaan Pensiunan, bertempat tinggal di Jl.Abdul Gani Atas no.4 Kota Batu. Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**.

Dalam hal ini para Penggugat diwakil oleh Kuasa Hukumnya, para advokat dan Konsultan Hukum di LAW FIRM M.N. HIDAYAT, SH.MH & HARLEY KASENDA, SH & Associates, beralamat kantor di Jl.Raya Kertanegara No.22, Karangploso, Malang; berdasarkan

surat kuasa khusus tertanggal 29 September 2011, selanjutnya disebut **KUASA PENGGUGAT**.

MELAWAN :

2. (S), Pekerjaan swasta, Alamat di Jl. MT. Haryono No.115, RT.02/RW.04 Kel Ketawanggede, Kec. Lowokwaru, Kota Malang, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT I**.
3. (R), Alamat: Graha Rekso Building Lantai 8, Jl. Bulevar Artha Gading Kav.Al Sentra Bisnis Artha Gading, Kelapa Gading, Jakarta Utara cq MC.DONALD'S DINOYO, Alamat Jl.MT Haryono No.115, Malang, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II**.
4. (T), pekerjaan Notaris, alamat di Jl.Arjuno No.26 Malang, selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERGUGAT I**.
5. (P), Alamat di Jalan Jonge I No.1 Malang, selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERGUGAT II**.

b) Obyek

Objek hukum ialah segala sesuatu yang menjadi sasaran pengaturan hukum dimana segala hak dan kewajiban serta kekuasaan subjek hukum berkaitan di dalamnya. Mengenai obyek hukum pada kasus ini yaitu, adalah: Akta Notaris No.38 Tanggal 14 Januari 2003 Tentang Pembagian Harta Bersama/Gono Gini, untuk selanjutnya disebut Obyek Sengketa. (vide bukti P7).

c) Duduk Perkara

Tentang duduk perkaranya dari kasus, yaitu pemaparan kronologi peristiwa dari awal mulanya kasus terjadi. Pada kasus ini, bermula dari pernikahan antara Penggugat (N) dan Tergugat I (S) pada tanggal 8 Januari 1968 dihadapan pegawai pencatatan nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Jombang. (vide bukti P-1).

Selama perkawinan pasangan suami istri (N) dan (S) dikarunai 4 (empat) orang anak, masing-masing bernama: (B), (C), (D), (E) yang kesemuanya telah berumur dewasa. (vide bukti P-2). Selama perkawinan tersebut pasangan suami istri (N) dan (S) mempunyai beberapa harta bersama, salah satunya

adalah Sertifikat Hak Milik No.47 tanggal 11 September 1976 atas nama Penggugat (N), gambar situasi Nomor 63, tanggal 25 Pebruari 1976. Setempat dikenal dengan Jl. MT. Haryono No. 115 (d/h Jl. Mayjen Haryono No. 76), Kelurahan Ketewanggede, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang. Dengan batas-batas sebagai berikut: Sebelah Barat Pak Hendro, Sebelah Utara Jl. Raya MT. Haryono, Sebelah Timur Jl. Watu gong, Sebelah Selatan Myrna Maisaroh. (untuk selanjutnya disebut sebagai tanah sengketa/objek sengketa). (vide bukti P3, dan P4).

Setelah berjalannya waktu, antara (N) dan (S) mengalami ketidak cocokan sebagai suami istri. Pada tanggal 15 Oktober 2002 (N) mengajukan permohonan cerai talak.

Pada tahun 2003 antara (N) dan (S) muncul ide untuk pembagian harta bersama/gono gini yang diperoleh selama perkawinan, maka pada tanggal 14 Januari 2003 antara (N) dan (S) telah melakukan pembagian harta gono gini yang disebut dengan Akta Pembagian Harta Bersama/Gono gini, nomor 38 yang dibuat oleh dan dihadapan turut Tergugat I (T). (vide bukti P-7).

Menurut (N) pembagian harta bersama/gono gini tersebut dibuat dengan sangat menguntungkan (S) namun merugikan (N) karena dengan dalih hibah kepada anak-anaknya (S) telah terjadi penukaran tanah kosong AJB No.39/Juni/2002, seluas 1410 M2 di Junrejo Kota Batu atas nama (S) dengan tanah dan rumah dengan SHM No.47 Luas 1338 M2 di Jl. MT Haryono No. 115 Kota Malang atas nama (N).

Maka berdasar fakta-fakta hukum menurut (N) tersebut diatas, (N) mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Malang agar memeriksa dan memutus perkara.

2. Akibat Hukum Dari Putusan Perkara Nomor:191/Pdt.G/2011/Pn.Mlg Dengan Objek Gugatan Harta Bersama Dianalisis Dari Sudut Pandang Norma

Atas deskripsi posisi kasus diatas serta dalam isi putusan dasar pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malang pada putusan nomor:191/Pdt.G/2011/Pn.Mlg maka dapat diketahui bahwa telah terjadi ketidaksesuaian antara pokok permasalahan dengan dasar hukum gugatan. Karena sebenarnya pokok permasalahan yang terjadi antara penggugat dengan mantan istri atau tergugat I adalah mengenai hal harta bersama/gono gini yang dalam pembagiannya sudah dibagi menurut akta notaris nomor 38 tanggal 14 januari 2003 dan akta tersebut yang dipermasalahkan oleh Penggugat.

Sedangkan penggugat dalam gugatannya menggunakan dasar gugatan Perbuatan Melawan Hukum. Hal demikian membuat gugatan menjadi obscur libeli atau gugatan menjadi tidak jelas dan kabur. Seharusnya penggugat dalam gugatannya yang menggugat mengenai hal pembagian harta bersama/gono gini dan hubungan dahulu antara penggugat dengan tergugat I atau mantan istri adalah pernikahan dan perceraian secara Islam, dan sampai saat gugatan timbul masih beragama Islam, maka gugatan penggugat mengenai hal itu adalah kewenangan mutlak pengadilan agama sesuai dengan pasal 49 pada Undang Undang Peradilan agama, bukn kewenangan Pengadilan Negeri. Sehingga perkara Nomor:191/Pdt.G/2011/Pn.Mlg. yang digugat ke Pengadilan Negeri Malang adalah menjadi absolut kompetensi.

Norma hukum pada putusan Majelis Hakim mengenai kompetensi bsolut atau hal hakim tidak berkuasa, pada reglement Indonesia dijelaskan dalam pasal 134 HIR. Kekuasaan absolut artinya kekuasaan Pengadilan yang berhubungan dengan jenis perkara atau jenis pengadilan atau tingkat

pengadilan, dalam perbedaannya dengan jenis perkara atau jenis pengadilan atau tingkatan pengadilan lainnya.⁹

Pasal 134 reglemen Indonesia mengenai atribus kekuasaan hakim, jika hal yang dituntut oleh penggugat itu menurut hukum tidak boleh diperiksa oleh pengadilan Negeri, oleh karena Pengadilan Negeri tidak berkuasa memeriksanya, maka eksepsi dapat diajukan pada sewaktu waktu sepanjang perjalanan pemeriksaan perkara, bahkan hakim wajib berhubungan dengan jabatnya untuk memecahkan soal berkuasa atau tidaknya itu dengan tidak menunggu dimajukanya keberatan dari pihak yang berperkara.

Terhadap kompetensi absolut ini Pengadilan Negeri diharuskan untuk meneliti perkara yang diajukan kepadanya apakah termasuk kompetensi absolutnya atau bukan. Kalo jelas bukan kewenangan absolutnya Pengadilan Negeri dilarang menerimanya. Jika Pengadilan Negeri menerimanya maka pihak tergugat dapat mengajukan keberatan yang disebut eksepsi kompetensi absolut dan jenis eksepsi ini boleh diajukan kapan saja.

Demikian pula dengan perkara nomor : 191/Pdt.G/2011/Pn.Mlg. mengapa majelis hakim mengabulkan eksepsi para tergugat mengenai kewenaggan mutlak, padahal pihak tergugat pula mendalilkan eksepsi selain eksepsi kewenagan mutlak, karena eksepsi tersebut harus diperiksa terlebih dahulu dan diputuskan. Terbukti bahwa perkara tersebut bukan merupakan kewenaggan mutlak Pengadilan Negeri Malng karena pokok perkara adalah mengenai harta bersama dan para pihaknya beragama Islam, maka jelas bahwa perkara tersebut adalah kewenaggan mutlak Pengadillan Agama.

3. Akibat Hukum Dari Putusan Perkara Nomor:191/Pdt.G/2011/Pn.Mlg Dengan Objek Gugatan Harta Bersama Ditinjau Dari Sudut Pandang Putusan Pengadilan

Terhadap gugatan Penggugat (N) yang telah penulis uraikan di atas, ketika proses persidangan para Tergugat telah memberikan jawaban gugatan atas

⁹ H. Roihan Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, PT.Raja Grafindo Persada. Jakarta, 2001, Hlm. 27

pokok perkara, telah pula mengajukan keberatan/eksepsi tertulis tertanggal 13 Februari 2012.

Atas eksepsi tersebut, Penggugat dalam repliknya tertanggal 27 Februari 2012 pada intinya menyatakan tidak sependapat dengan eksepsi para Tergugat. Penggugat (N) menyatakan bahwa gugatan perkara diajukan ke Pengadilan Negeri Malang atau Pengadilan Umum, karena berkaitan dengan Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh para Tergugat.¹⁰

Pengadilan Negeri Malang sebagai badan peradilan yang menangani perkara-perkara perdata di wilayah Kota Malang telah menerima, memeriksa dan memutus perkara dengan Putusan Nomor: 191/Pdt.G/2011/Pn.Mlg.

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malang dalam perkara nomor:191/Pdt.G/2011/Pn.Mlg memberikan putusan dengan amar:

MENGADILI

1. Mengabulkan Eksepsi para Tergugat tentang kewenangan mengadili;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Malang tidak berwenang mengadili gugatan Penggugat dalam perkara nomor:191/Pdt.G/2011/Pn.Mlg;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini berjumlah Rp 876.000,- (delapan ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malang.

Putusan perkara nomor:191/Pdt.G/2011/Pn.Mlg yang telah diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malang adalah putusan tentang dikabulkannya eksepsi para tergugat tentang kewenangan mengadili atau absolut kompetensi. Dalam perkara ini yang dimaksud absolut kompetensi adalah absolut kompetensi Pengadilan Negeri Malang.

¹⁰H. Roihan Rasyid, *Ibid.* hlm. 43

Dalam memberikan putusan, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malang tersebut telah melakukan proses tanya jawab, replik, duplik pembuktian dan konklusi sebagaimana yang diisyaratkan oleh hukum acara untuk memutus pokok perkara, sehingga putusan Majelis hakim Pengadilan Negeri Malang merupakan putusan akhir (eind vonis) yang bersifat final (final judgement).

Maka dari deskripsi dan analisis penulis diatas, dapat diambil kesimpulan bahwa Putusan pengadilan Negeri Malang Nomor: 191/Pdt.G/2011/Pn.Mlg. adalah putusan mengenai dikabulkannya eksepsi para tergugat tentang kompetensi absolut dengan objek gugatan harta bersama, merupakan putusan akhir. Terhadap putusan tersebut semenjak putusan di bacakan tidak ada lagi upaya hukum dari para pihak maka putusan tersebut menjadi pasti tau tetap dan putusan itu memperoleh kekuatan yang mengikat. Didalam bahasa latin dikatakan *res judicata pro veritate habetur* artinya putusan yang pasti dengan sendirinya mempunyai kekuatan yang mengikat (“apa yang di putuskan oleh hakim adalah dianggap benar).

Pada putusan nomor: 191/Pdt.G/2011/Pn.Mlg. tersebut menimbulkan hak bagi tergugat dan menimbulkan kewajiban bagi Pengugat. Hak bagi Tergugat adalah berhak atas terbebasnya dari segala gugatan atau tuntutan hukum Pengugat. Sehingga dalam perkara tersebut pihak tergugat tidak ada kewajiban yang harus dijalankan. Pihak tergugat tetap dapat melakukan aktifitasnya dalam perkara ini adalah hubungan kontrak sewa menyewa lahan sebagai aktivitas perniagaan. Tergugat juga tetap sah dimuka hukum atas kepemilikan suatu Sertifikat Hak Milik yang secara sah berdasarkan atas hak yang benar adalah merupakan hak miliknya. Sedangkan kewajiban pihak Pengugat dalam putusan hakim adalah membayar biaya perkara persidangan jumlah rupiah yang telah ditetapkan oleh Majelis Hakim.

E. PENUTUP

1. Kesimpulan

Berdasarkan uraian bab-bab sebelumnya maka dapat diambil kesimpulan bahwa: Akibat hukum putusan perkara nomor: 191/Pdt.G/2011/Pn.Mlg dengan obyek gugatan harta bersama terkait tentang kompetensi absolut

yang diajukan ke Pengadilan Negeri Malang oleh Penggugat atau (N) dilihat dari dua sudut pandang, yaitu Akibat Hukum putusan perkara nomor: 191/Pdt.G/2011/Pn.Mlg dari sudut pandang norma bahwa terhadap hal telah terjadi ketidaksesuaian antara pokok permasalahan dengan dasar gugatan karena sebenarnya pokok permasalahan yang terjadi antara Penggugat dengan mantan istri atau Tergugat I adalah mengenai hal Harta Bersama/Gono Gini sedangkan Penggugat dalam gugatannya menggunakan dasar gugatan untuk menggugat mantan istri tersebut dengan dasar Perbuatan Melawan Hukum, dan penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Malang maka akibat segi normanya adalah menjadi absolut kompetensi, seharusnya gugatan diajukan ke Pengadilan Agama sesuai pasal 49 UU Peradilan Agama. Dan akibat hukum putusan perkara nomor: 191/Pdt.G/2011/Pn.Mlg dari sudut pandang putusan pengadilan adalah Putusan Pengadilan Negeri Malang tersebut menjadi putusan pasti atau tetap dan putusan itu mempunyai kekuatan yang mengikat terhadap kedua belah pihak. Pada putusan yang telah diputuskan Pengadilan Negeri Malang tersebut harus dihormati oleh kedua belah pihak dan salah satu pihak tidak boleh bertindak bertentangan dengan putusan. Di dalam bahasa latin dikatakan “*Res judicata pro veritate habetur*” (putusan yang pasti dengan sendirinya mempunyai kekuatan yang mengikat) artinya “apa yang diputuskan oleh hakim, adalah dianggap benar”.

2. Saran

Berdasar dari hasil penelitian yang sudah penulis lakukan terhadap permasalahan tentang harta bersama/gono gini terkait tentang kompetensi absolute badan peradilan, penulis hendak memberikan saran kepada beberapa pihak, yaitu :

1. Bagi pemerintah, perlu berperan aktif dilakukannya penyuluhan hukum kepada masyarakat, sehingga pemahaman masyarakat tentang hukum, khususnya hukum acara perdata Pengadilan Negeri, agar tidak salah memasukkan gugatan.

2. Bagi akademisi, yaitu baiknya selalu menambah wawasan kita untuk terus belajar tentang segala kemungkinan banyaknya konsekuensi hukum dalam praktek acara perdata mengenai kompetensi absolute atau kewenangan mutlak pengadilan sesuai dengan pembagian kewenangan.
3. Bagi Praktisi Hukum, untuk selalu menambah wawasan mengenai putusan-putusan jenis perkara perdata yang bervariasi, seperti putusan nomor: 191/Pdt.G/Pn.Mlg supaya memiliki pengetahuan luas.
4. Bagi Kuasa hukum, harus mempelajari, mengetahui dan menguasai terlebih dulu tentang kompetensi Absolut Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama, supaya tidak salah dalam mengajukan gugatan.
5. Bagi Pemohon, dalam perkara ini pihak Penggugat, hendaknya untuk lebih aktif mencari informasi apabila hendak mengajukan gugatan ke Pengadilan, supaya tidak salah mengajukan gugatan.
6. Bagi Peneliti, harus lebih giat membaca dan berfikir sistematis untuk menambah pengetahuan dan keilmuan dalam bidang hukum perkawinan, hukum praktek acara perdata khususnya tentang kasus hukum, putusan hakim, dan ilmu-ilmu hukum lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku Literatur

- Abdul Manan, 2001, *Pokok-Pokok Hukum Perdata Wewenang Peradilan Agama*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Abdul Manan, 2006, *Revormasi Hukum Islam*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- H Hilman Hadikusuma, 1990, *Hukum Perkawinan Indonesia*.,Mandar Maju, Bandung.
- Hazairin, 1961, *Hukum Kekeluargaan Nasional Indonesia*, Tintamas, Jakarta.
- H. Roihan A.Rasyid, 2001, *Hukum Acara Peradilan Agama*, PT Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Henny Mono, 2007, *Praktik Berperkara Perdata*, Bayumedia Publishing, Jawa Timur.
- J Satrio, 1993, *Hukum Harta Perkawinan*, PT Citra Aditya Bakti, Jakarta.
- Munir Fuady, 2002, *Perbuatan Melawan Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Jakarta.
- Martiman Projohamidjojo, 1984, *Kekuasaan Kehakiman dan Wewenang Untuk Mengadili*, Balai Aksara, Jakarta Timur.
- Mohd. Idris Ramulyo, 1999, *Hukum Perkawinan Islam*, Bumi aksara, Jakarta.
- M. Yahya Harahap, 1975, *Hukum Perkawinan Nasional*, Cv Zahir Trading Co, Medan.
- Peter Mahmud Marzuki, 2011, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Grup, Jakarta.
- R. Subekti. 2004, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, PT.Pradnya Paramita, Jakarta.
- R.Soepomo, 2002, *Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri*, PT Pradnya Paramita, Jakarta.
- R. Soetojo Prawirhamidjojo, 1988, *Pluralisme Dalam Perundang-Undangan Perkawinan di Indonesia*, Universitas Airlangga Press, Surabaya.
- Satria Effendi, *Problematika Hukum keluarga Islam Kontemporer*, Kencana, Jakarta, Cet.2
- Subekti, 1982, *Hukum Acara Perdata*, Bina Cipta:Bandung.

Sudikno Mertokusumo, 2009, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Jogjakarta.

Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, Liberty, Yogyakarta.

Soetojo Prawirohamidjojo, 1996, *Sejarah Perkembangan Hukum Perceraian di Indonesia dan Belanda*, Airlangga University Press, Surabaya.

Surojo Wignjodipuro, 1967, Pengantar dan asas-asas hokum adat, Gunung Agung, Jakarta.

Yahya Harahap, 1990, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*, Pustaka Katini, Jakarta.

Zainuddin Ali, 2006, *Hukum Perdata Islam Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.

Buku Pedoman Penulisan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Tahun Akademik 2012/2013

Perundang-Undangan:

Kompilasi Hukum Islam

HIR

Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan

Undang-undang nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Undang-undang nomor 50 tahun 2009 perubahan kedua atas undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pasal 50 ayat (2)

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung

Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksana Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974

Kompilasi Hukum Islam

Putusan Pengadilan:

Putusan Perkara Nomor.191/Pdt.G/2011/PN.Malang

Makalah:

Muhammad Isda Wahyudi, 2006, *Harta Bersama: Antara Konsepsi dan Tuntutan Keadilan*, Makalah calon hakim mahkamah agung RI.